



**RENCANA KERJAPERUBAHAN
(RENJA)
TAHUN 2017**

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA BUKITTINGGI**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi Tahun 2017 dengan pilihan “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi di bidang pendidikan dan terkelolanya arsip dan dokumentasi sebagai bahan pertanggungjawaban Pemerintah Kota Bukittinggi”. Hal ini merupakan tantangan yang harus diemban oleh seluruh staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi.

Allhamdulillah berkat kerjasama yang solid Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi dapat merealisasikan dengan disusunnya rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi Tahun 2017.

Rencana kerja ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan perpustakaan, arsip dan dokumentasi sebagai bahan pertanggungjawaban Pemerintah Kota Bukittinggi serta merupakan dasar penyusunan akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi.

Demikianlah rencana kerja ini kami buat, mungkin saja ini ada kelemahan dan kekurangannya, kepada pembaca yang budiman kami harapkan kritik dan saran perbaikannya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bukittinggi, Juni 2017
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Bukittinggi

dto
Drs. NOVRI
NIP. 19641124 199103 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Dasar Hukum.....	1
1.4 Sistematika Penyusunan.....	5
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan Triwulan II.....	6
III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
3.1 Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	19
IV. PENUTUP	
Penutup	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan yang memuat perubahan atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dari visi dan misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2017 yang bersinergi dengan visi dan misi Kota Bukittinggi, yang merupakan salah satu langkah penyesuaian atas perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2017.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerjamemperhatikan perkembangan serta kebutuhan masyarakat di Kota Bukittinggi, hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 sampai pada Triwulan II dan perhitungan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga seluruh Program dan Kegiatan dapat terlaksana dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi tahun 2017 adalah:

1. Sebagai optimalisasi pelaksanaan pembangunan baik dari aspek penganggaran, maupun kinerja program dan kegiatan;
2. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017;
3. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun berikutnya.

1.3. Dasar Hukum

Landasanhukum Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi tahun 2017 ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4503);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019;
19. Peraturan daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 07);
22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);

23. Peraturan Walikota Bukittinggi No. 24 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II dan III Serta Rincian Tugas Eselon IV Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi;

24. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi tahun 2016-2021;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi Tahun 2016 dengan susunan sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN :
- Menjabarkan mengenai Latar Belakang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II :
- Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II dan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja terhadap Renstra SKPD;
- BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD
- Berisikan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- BAB IV PENUTUP
- Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial dan tenaga kerja;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, salah satunya melalui penetapan perencanaan jangka menengah. Visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen Renstra didukung dengan Strategi Umum yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan untuk selanjutnya diuraikan ke dalam kegiatan – kegiatan selama 5 tahun yang mendukung masing-masing program tersebut.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi tersebut, telah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 sebanyak 6 program dan 51 kegiatan sesuai dengan skala prioritas melalui APBD Kota Bukittinggi. Realisasi atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sampai dengan Bulan Juni Tahun 2017 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017
Per Juni 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI FISIK			PERKIRAAN RASIONALISASI	PPTK
					TARGET	REALISASI	%		
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	539.908.708	143.330.289	26,55%					
1	Penyediaan jasa surat menyurat	1.950.000	770.000	39,49%	150 lbr materai 3000, 200 lbr materai 6000, 4 buah buku cek	20 lbr materai 3000, 25 lbr materai 6000, 1 buah buku cek	16%	-	Hilda Haryani, A.Md
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36.000.000	6.119.467	17%	4 rekening x 12 bulan	4 rekening x 6 bulan	50%		Herliantin. B
3.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.700.000	1.790.000	23,25%	12 jenis	24 jenis	200%		Herliantin. B
4.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	117.939.200	33.524.602	28,43%	9 unit	18 unit	200%	-	Herliantin. B
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.370.780	6.582.680	89,31%	360 jenis	360 jenis	100%	-	Hilda Haryani, A.Md

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI FISIK			PERKIRAAN RASIONALISASI	PPTK
					TARGET	REALISASI	%		
6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	16.454.908	7.844.210	47,67%	44 jenis	88 jenis	200%	-	Hilda Haryani, A.Md
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.867.500	6.604.650	55,65%	9 jenis	18 jenis	200%		Herliantin. B
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.699.280	0	0%	4 jenis	0	0%	-	Herliantin. B
9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	110.000.000	2.197.500	2%	2000 eks 500 eks	125			Herliantin. B
10.	Penyediaan makanan dan minuman	9.270.000	0	0%	3 jenis	0	0%		Herliantin. B
11.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar Kota Bukittinggi	90.000.000	55.916.501	62,13	100%	77	77%	-	Herliantin. B

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI FISIK			PERKIRAAN RASIONALISASI	PPTK
					TARGET	REALISASI	%		
12.	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	125.657.040	21.980.679	17,49%	2 orang	2 orang	100%	-	Herliantin. B
13.	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	4.000.000	0	0%	8 orang	0	0%		Hilda Haryani, A.Md
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	621.700.000	0	0%					
14.	Pengadaan Mebeleur	229.750.000	0	0%	18 jenis	0	0%	-	Yatriati
15.	Pengadaan Peralatan Kantor	291.950.000	0	0%	5 paket	0	0%	-	Yatriati
16	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	100.000.000	0	0%	1 Paket	-	0%	-	Herliantin. B
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.037.130	1.140.900	56,01%					

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI FISIK			PERKIRAAN RASIONALISASI	PPTK
					TARGET	REALISASI	%		
17.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	474.900	0	0%	8 eks	0	0%		Herliantin. B
18.	Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD	1.227.280	1.140.900	92,96%	8 eks	0	0%		Herliantin. B
19.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	334.950	0	0%	4 eks	0	0%		Herliantin. B
	Perpustakaan								
IV	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	495.364.120	200.393.225	40,45%				-	
20	Bukittinggi Library Fiesta	126.053.815	103.306.335	81,95%	5 kegiatan	5 kegiatan	1005	-	Dra. Yusnimar
21	Layanan Teknologi Informasi Perpustakaan	43.800.000	11.128.800	25,41%	100	38	38%	-	Syah Rahmat, S.Sos
22	Layanan Perpustakaan Keliling	24.383.900	9.513.750	39,02%	94 kunjungan	52 kunjungan	55%	-	Yasri. S.Sos

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI FISIK			PERKIRAAN RASIONALISASI	PPTK
					TARGET	REALISASI	%		
23.	Penyelenggaraan Operasional Perpustakaan Umum Daerah	25.355.200	6.736.430	26,57%	12 bulan				Debi Cinthia Dewi, S. Pi
24,	Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan Bahan Pustaka	62.115.805	28.920.300	46,56%	9000 eks	4200 eks	47%		Nelliwarti, B.Sc
25	Pembinaan Perpustakaan	29.759.400	4.804.360	16,14	78 kunjungan	7 kunjungan	9%		Syah Rahmat, S.Sos
26	Lomba Perpustakaan Terbaik	32.895.800	0	0%	87 perpustakaan				Syah Rahmat, S.Sos
27	Alih Media Koleksi Perpustakaan	10.000.000	880.000	8,8%	5000 eks	500 eks	10%		Syah Rahmat, S.Sos

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI FISIK			PERKIRAAN RASIONALISASI	PPTK
					TARGET	REALISASI	%		
V	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	791.822.567	53.544.890	6,76%					
33.	Pembangunan / Pemeliharaan Data Base Informasi Kearsipan	48.482.275	0	0%	25 SKPD	0	0%	-	Ade Mulyani, SE, M.Si
34	Pemeliharaan dan Perawatan Dokumen Daerah	59.015.647	1.374.050	2,33%	72 dokumen				Drs. Joharman
35.	Penyusutan Arsip In Aktif	6.328.800	898.500	14,20%	5000 dokumen	3000 dokumen	60%	-	Murniati, S.Pd
36.	Pengelolaan Arsip Elektronik (E-Arsip) SIKN JIKN	26.444.935	12.193.360	46,11%	500 lembar	0	0%		Ade Mulyani, SE, M.Si
37.	Lomba Arsip Bernilai Sejarah	135.064.335	0	0%	16 peserta	0	0%	-	Dra. Yusnimar
38.	Pengumpulan Data (Akuisisi) Statis	45.482.300	1.341.450	2,95%	2 SKPD	0	0%		Drs. Joharman

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI FISIK			PERKIRAAN RASIONALISASI	PPTK
					TARGET	REALISASI	%		
39	Pengadaan dan Pengumpulan Dokumentasi Daerah	195.408.250	6.549.000	3,35%	1 bundel dokumen daerah	9	0%		Murniati, S.Pd
40	Pengadaan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Persubstantif	68.287.250	10.459.980	15,32%	1 substansif urusan wajib	0	0%		Murniati, S.Pd
41.	Penyusunan Peraturan Daerah Mengenai Arsip	36.982.100	20.728.550	56,05%	1 dokumen	0	0%		Misni, S.Sos
42.	Sistem Informasi Kearsipan Kota Bukittinggi	170.326.675	0	0%	1 paket	0	0%		Ade Mulyani, SE, M.Si
VI	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	437.326.580	94.832.845						
43.	Pembinaan Langsung tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Arsip Dinamis pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi	12.746.350	6.056.000	47,51%	3 SKPD	0	0%	-	Murniati, S.Pd
44.	Bimbingan Teknis Kearsipan	51.598.200	0	0%	30 orang	0	0%	-	Ade Mulyani, SE, M.Si
45.	Layanan Informasi Arsip Statis	108.143.700	13.054.125	12,07%	30 pengeuna arsip statis	18	16%		Misni, S.Sos

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI FISIK			PERKIRAAN RASIONALISASI	PPTK
					TARGET	REALISASI	%		
46.	Promosi dan pameran arsip statis	94.717.665	75.722.720	79,95%	1 kali	1 kali	100,00%	-	Dra. Yusnimar
47.	Pembuatan Film Dokumenter Kilas Balik Bukittinggi	170.120.665	0	0%	1 buah	0%	0%		Drs. Joharman
48.	Sosialisasi Pengelolaan Arsip SKPD								
	JUMLAH	2.888.159.105	493.242.149	17,08%			30%		

Belum tercapainya pelaksanaan beberapa kegiatan sesuai dengan target rencana pelaksanaan kegiatan tahunan disebabkan beberapa hal yaitu:

1. Masih kurangnya koleksi buku bacaan,
2. Belum maksimalnya pelayanan Berbasis Teknologi Informasi Perpustakaan,
3. Kurangnya sumber daya pengelolaan perpustakaan,
4. Belum adanya ruang pelayanan perpustakaan yang representative,
5. Belum tertatanya arsip pada masing-masing SKPD,
6. Belum adanya pelayanan Berbasis Teknologi Kearsipan,
7. Belum adanya depo arsip,
8. Belum terdokumentasi dengan baik dokumen-dokumen bersejarah yang ada,
9. Belum adanya sarana layanan informasi arsip yang permanen,
10. Belum terpolanya penambahan khasanah arsip untuk dokumen bernilai sejarah,
11. Belum adanya layanan tentang dokumen yang permanen,
12. Belum adanya alih Dokumentasi Kota Bukittinggi yaitu media arsip permanen.

1. Beberapa Kegiatan akan dilakukan efisiensi / penghapusan kegiatan pada perubahan anggaran antara lain:

<u>NO</u>	<u>KEGIATAN</u>	<u>ANGGARAN</u>	<u>KETERANGAN</u>
1	Penyelenggaraan Operasional Perpustakaan Umum Daerah	6.930.000	Terdapat kegiatan yang tidak ada dalam standar biaya.
2.	Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan Bahan Pustaka	2.000.000	Pengembalian dana untuk honor karena tidak terdapat dalam Standar biaya.
3.	Pembinaan Perpustakaan	1.429.000	Koreksi atas kesalahan dalam mengentry volume kegiatan dalam DPA.
4.	Pengumpulan Data (Akuisisi) Statis	44.140.850	Setelah melakukan konsultasi ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang, didapat informasi bahwa kegiatan ini memerlukan JRA, sementara JRA masih dalam penyusunan.
5	Pembangunan/Pemeliharaan Data Base Informasi Kearsipan	48.482.275	Belum ada kesiapan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi dalam pelaksanaannya.
6	Layanan Informasi Arsip Statis	57.340.000	Pengurangan pembayaran honor.

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Sebagai bagian dari pembangunan nasional, bidang perpustakaan dan kearsipan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu, pembangunan di bidang perpustakaan dan kearsipan diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka peningkatan penambahan wawasan dan keilmuan melalui berbagai kebijakan.

Dengan adanya sektor perdagangan dan jasa serta pariwisata yang menjadi sektor unggulan daerah, maka urusan perpustakaan dan kearsipan ikut tumbuh seiring dengan kompleksnya sektor tersebut.

Pada Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 34 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, yang juga diuraikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi, terdapat 6 program dan 51 kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun 2017.

Namun berdasarkan hasil evaluasi serta pertimbangan atas berbagai aspek perubahan yang terjadi di tengah masyarakat, beberapa kegiatan harus dilaksanakan perubahan demi mengoptimalkan capaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran APBD.

Seluruh Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dikelompokkan dalam bentuk penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan. Penggambaran Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam Perubahan Rencana Anggaran dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel.2
Program dan Kegiatan pada Perubahan Anggaran 2017

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar	48 rekening, bulan	48 rekening, bulan	36.000.000	56.000.000	20.000.000
3.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Berfungsinya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	7.700.000	19.400.000	11.700.000
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya kendaraan operasional dengan baik	100%	100%	117.939.200	147.939.200	30.000.000
5	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Terciptanya ruang kerja yang bersih dan sehat	100%	100%			-
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lancarnya administrasi perkantoran	100%	100%			
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lancarnya administrasi perkantoran	100%	100%	11.867.400	16.867.400	5.000.000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronik	100%	100%	3.500.000	3.500.000	-
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas lembur	100%	100%			
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kunjungan ke perpustakaan	25%	25%			
11.	Rapat Rapat Koordinasi, konsultasi, Sosialisasi, dan Perjalanan Dinas Lainnya	Koordinasi, konsultasi, informasi, pendidikan yang diikuti	100%	100%	90.000.000	190.000.000	100.000.000
12.	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Tingkat pemenuhan kebutuhan pegawai non PNS	100%	100%	125.857.040	51.070.655	(74.786.385)
13	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	Meningkatnya kualitas administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	100%	100%	4.000.000	12.000.000	8.000.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	Pengadaan Meubiler	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%			-
2.	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur					
3.	Pengadaan Peralatan Kantor	Tingkat Pemenuhan sarana prasarana aparatur	100%	100%	291.950.000	321.950.000	30.000.000
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya bangunan gedung kantor dan representative	100%	100%			-
5.	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat	Tersedianya Kendaraan dinas yang layak pakai		100%	0	350.000.000	350.000.000
6.	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua	Tersedianya Kendaraan dinas yang layak pakai		100%	0	40.000.000	40.000.000
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
1.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersedianya bahan evaluasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi	100%	100%			
2.	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Tersedianya pedoman dan penyusunan program kegiatan tahun 2018	100%	100%	1.227.430	1.140.900	(86.530)
3.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya bahan evaluasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi	100%	100%			-
Perpustakaan							
4.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan						
1.	Bukittinggi Library Fiesta	Jumlah pengguna perpustakaan sekolah/kelurahan/rumah dinas/instansi pemerintah	205	205	126.053.815	107.063.315	(18.990.500)
2.	Layanan Teknologi Informasi Perpustakaan	Peningkatan jumlah anggota perpustakaan	100%	100%	43.800.000	96.540.000	52.740.000
3.	Layanan Perpustakaan Keliling	Jumlah anggota pustaka keliling	2100 orang	2100 orang			
4.	Penyelenggaraan Operasional Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah pemustaka	20%	20%	25.355.200	18.425.200	(6.930.000)
5.	Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi bahan perpustakaan yang dikelola	5000 eks	5000 eks	62.115.805	60.115.805	(2.000.000)
6.	Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengguna perpustakaan sekolah/kelurahan/rumah ibadah/instansi pemerintah	100 kunjungan	101 kunjungan	29.759.400	28.330.400	(1.429.000)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
7.	Lomba Perpustakaan Terbaik	Jumlah perpustakaan yang sesuai standar	6%	6%			
8.	Alih Media Koleksi Prpustakaan	Jumlah koleksi langka perpustakaan yang dikelola	20%	20%			
9.	Pengembangan Sumber Daya Pengelola	Persentase terkelolanya perpustakaan sesuai standar	20%	20%			
10.	Seminar Pembudayaan Gemar membaca	Jumlah pengguna perpustakaan sekolah/kelurahan/rumah ibadah/instansi pemerintah	20%	20%			
11.	Pemeliharaan Bahan/Koleksi Bahan Pustaka	Jumlah koleksi bahan pustaka yang dikelola dan dipelihara	468 eks	468 eks			
12.	Penyediaan Bahan Pustaka Layanan Anak	Jumlah pemustaka kategori usia anak	220 orang	220 orang			
13.	Bedah Buku	Jumlah pengguna perpustakaan sekolah/kelurahan/ rumah ibadah /instansi pemerintah	200 orang	200 orang			
Kearsipan							
5. Program Perbaikan Sistem Administarsi Kearsipan							
1	Pembangunan/Pemeliharaan Data Base Informasi Kearsipan	Jumlah lembaga, SKPD, masyarakat yang memanfaatkan arsip	25 SKPD	25 SKPD	48.482.275	48.482.275	
2	Pemeliharaan dan Perawatan Dokumen Daerah	Jumlah dokumen daerah yang terpeihara dan terselamatkan	78 dokumen	78 dokumen			
3	Penyusutan Arsip in Aktif	Jumlah SKPD dan masyarakat yang menerapkan arsip sesuai dengan aturan yang berlaku	8 SKPD	8 SKPD			
4	Pengelolaan Arsip Elektronik						
5	Lomba Arsip Bernilai Sejarah						
6	Pengumpulan Data (Akuisisi) Statis	Jumlah dokumen bernilai sejarah	6 dokumen	6 dokumen	45.482.300	1.341.450	(44.140.850)
7	Pengadaan dan Pengumpulan Dokumentasi Daerah	Jumlah dokumen bernilai sejarah	1 bundel	1 bundel	195.408.250	593.408.250	398.000.000
8	Pengadaan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Persubstantif						-
9	Penyusunan Peraturan Daerah Mengenai Arsip	Terwujudnya penyelamatan arsip daerah	100%	100%	36.102.100	70.442.100	34.340.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
10.	Sistem Informasi Kearsipan Kota Bukittinggi						
6.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi						
1	Pembinaan Langsung tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Arsip Dinamis pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi						
2	Bimbingan Teknis Kearsipan	Jumlah SKPD/Instansi yang sudah menerapkan arsip sesuai dengan aturan yang berlaku	3 SKPD	3 SKPD	51.598.200	62.425.700	10.827.500 -
3	Layanan Informasi Arsip Statis	Jumlah layanan pemanfaatan informasi dokumen yang bernilai sejarah	20%	20%	107.826.950	50.486.950	(57.340.000) -
4	Promosi dan Pameran Arsip Statis	Jumlah lembaga, SKPD, masyarakat yang memanfaatkan arsip dan dokumentasi	20%	20%	94.717.665	72.327.165	(22.390.500) -
5	Pembuatan Film Dokumenter Kilas Balik Bukittinggi		1 buah	1 buah	67.500.000	67.500.000	-
6	Sosialisasi Pengelolaan Arsip SKPD	Terlaksananya penataan arsip SKPD	12 bulan	12 bulan	196.000.000	176.000.000	22.158.000

Dengan demikian, jumlah kegiatan yang dimasukkan ke dalam perubahan anggaran adalah 51 kegiatan. Jumlah total penambahan anggaran untuk kegiatan adalah sebanyak Rp 1.071.107.200,- sedangkan jumlah total rasionalisasi anggaran adalah Rp.228.093.765,-. Dengan demikian, pada akhir tahun 2017, diperkirakan terjadi penurunan pagu Belanja Langsung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari Rp.2.888.159.105,- menjadi Rp.2.660.065.340,- (berkurang Rp.228.093.765,-).

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perubahan adalah dokumen perencanaan yang memuat perubahan atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dari visi dan misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2017 yang bersinergi dengan visi dan misi Kota Bukittinggi, yang merupakan salah satu langkah penyesuaian atas perkembangan yang terjadi dalam periode pelaksanaan kegiatan tahun 2016.

Perubahan Rencana Kerja ini dibuat berdasarkan pertimbangan dan analisa perkembangan yang diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2016 serta mendukung tercapainya visi dan misi Kota Bukittinggi.

Jumlah kegiatan yang dimasukkan ke dalam perubahan anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi adalah 51 kegiatan. Jumlah total penambahan anggaran untuk 6 kegiatan adalah sebanyak Rp 1.-071.107.200,-. Dengan demikian, pada akhir tahun 2017 diperkirakan terjadi penurunan pagu Belanja Langsung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Dalam aplikasinya di lapangan, bisa saja terjadi perubahan yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, perubahan atas Program dan Kegiatan dapat dilaksanakan pada saat pembahasan perubahan anggaran tahun 2017.

Bukittinggi, Juni 2017
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA BUKITTINGGI

dto

Drs. NOVRI
NIP. 196411241991031004

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 189/ 45 /DPK-2017**

**RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA BUKITTINGGI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dirasa perlu untuk menetapkan Rencana Kerja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Bukittinggi 2013.
- b. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pokok-Pokok Kearsipan;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
10. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Daerah Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2004 Nomor 04);

21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lapangan Teknis Daerah Kota Bukittinggi.
25. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021
26. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45/382/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Bukittinggi.
27. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45/ /2016 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pememerintah kota Bukittinggi

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Penetapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi tahun 2017.
- KEDUA** : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi melaksanakan program dan kegiatan yang dituangkan dalam renja SKPD sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2017.
- KETIGA** : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja SKPD periode sebelumnya.
- KEEMPAT** : Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi tahun 2017 memuat target kinerja yang terukur baik sasaran maupun pendanaannya.
- KELIMA** : Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi tahun 2017, disusun dengan sistemetika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
BAB III	: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV	: PENUTUP LAMPIRAN

KEENAM : Renja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi ini.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 01 Juni 2017

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA BUKITTINGGI**

dto

Drs. NOVRI
NIP. 19641124 199103 1 004